

LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN
SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI



PADA
PENGADILAN NEGERI KOBA KELAS II

TRIWULAN I
TAHUN 2024

LEMBAR PENGESAHAN

**LAPORAN
HASIL PELAKSANAAN
SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA
PENGADILAN NEGERI Koba
KELAS II**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2017

Disahkan di Koba
Pada Hari Selasa, 2 April 2024



Ketua Pengadilan Negeri Koba

DERIT WERDININGSIH, S.H., M.H.
NIP. 197804302005022002

Tim Survey

USPA DEMARATI, S.H.
NIP. 198508042009122002

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, guna tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani yang akan dijadikan sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme, oleh karena itu Pengadilan Negeri Koba mengadakan survey ini.

Survey ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

Survey ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Koba, yang diambil dengan kuesioner.

Pelaksanaan survey dan laporannya ini, tentunya masih banyak kekurangan sehingga masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima.

Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Koba dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Koba.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pangkalpinang, 2 April 2024

Tim Survey

DAFTAR ISI

BAB I	i
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud Dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Rencana Kerja	2
BAB II	4
METODOLOGI	4
2.1. Metode Penelitian	4
2.2. Populasi Dan Sampel.....	4
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis	4
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control.....	5
2.5. Teknik Analisis Data.....	5
2.6. Tahapan pelaksanaan.....	6
BAB III	
INDEKS PERSEPSI KORUPSI	8
3.1. Profil responden.....	8
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator	8
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan	19
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan.....	21
BAB IV	24
PENUTUP	23
4.1. Kesimpulan.....	23
4.2. Rekomendasi.....	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survey Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survey Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survey persepsi korupsi beberapa

persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan melalui aplikasi Survey Pelayanan Elektronik Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (SISUPER) pada Pengadilan Negeri Koba.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survey dilakukan per triwulan atau 4 (empat) kali dalam setahun melalui Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER).

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER) dengan alamat:
http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/kontrol_ipk
- Pengisian Kuesioner oleh responden telah mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden kemudian Menyusun dan mencetak laporan layanan survey.

1.4.3. Metode Survey

Survey dilaksanakan dalam interval waktu per 3 (tiga) bulan/4 (empat) kali dalam setahun.

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental* sampling. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survey dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri dengan mengisi Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER) dengan alamat ***http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/kontrol_ipk*** melalui komputer touchscreen yang berada di lobi depan PTSP.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu per 3 (tiga) bulan. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang diambil dari Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER).

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survey IPAK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

Kedua, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survey lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survey persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1
Model alur penyusunan survey IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2
Ruang lingkup survey Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil responden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survey yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Koba mayoritas memiliki latar Dasar Pendidikan S1.

Tabel 4.

Tingkat pendidikan responden

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1	Tidak Sekolah	0	0
2	SD	2	3,77
3	SMP	5	9,43
4	SMU	18	33,96
5	Diploma	3	5,67
6	S1	24	45,28
7	S2	1	1,89
8	S3	0	0
10	Tidak mencantumkan pendidikan terakhir	0	0
Jumlah		53	100%

3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 49,06 % responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Koba memiliki pekerjaan sebagai lainnya.

Tabel 5.
Jenis pekerjaan responden

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	%
1	PNS	2	3,77
2	TNI	0	0
3	POLRI	6	11,32
4	SWASTA	11	20,75
5	WIRAUSAHA	7	13,21
6	TENAGA KONTRAK	1	1,89
7	LAINNYA	26	49,06
Jumlah		53	100%

3.1.3. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Koba berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 29 tahun s/d 39 tahun. Bagi kelompok usia di atas 50 tahun, jumlah responden semakin mengecil, demikian pula kelompok usia di atas 60 tahun.

Tabel 6.
Usia responden

No	Umur	Frekuensi	%
1	18-28	17	32,08
2	29-39	25	47,17
3	40-49	9	16,98
4	50-59	1	1,89
6	60-69	1	1,89
Jumlah		50	100%

3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 4,00 pada interval skor 3,26 s/d 4.00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Koba bersih dari Korupsi.

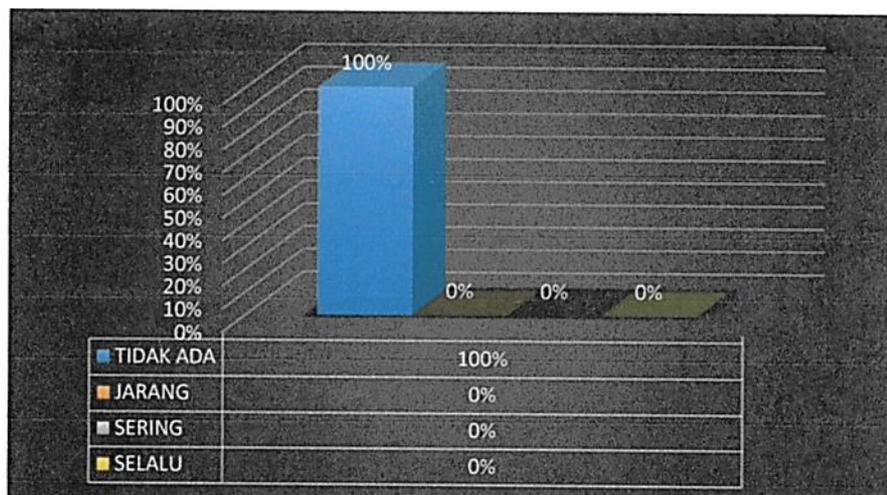
Tabel 7.

Indeks pada indikator manipulasi peraturan.

Apakah Pelayanan oleh Petugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan dan tidak dipersulit untuk maksud tertentu?

(Manipulasi Peraturan)

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi		Jumlah Nilai Per Ruang Lingkup
			F	%	
1.	Tidak ada	4	53	100	212
2.	Jarang	3	0	0	0
3.	Sering	2	0	0	0
4.	Selalu	1	0	0	0
Jumlah			53	100%	212
Nilai IPK (indeks Persepsi Korupsi)					4,00



3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 4,00 pada interval skor 3,26 s/d 4,00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Koba bersih dari Korupsi.

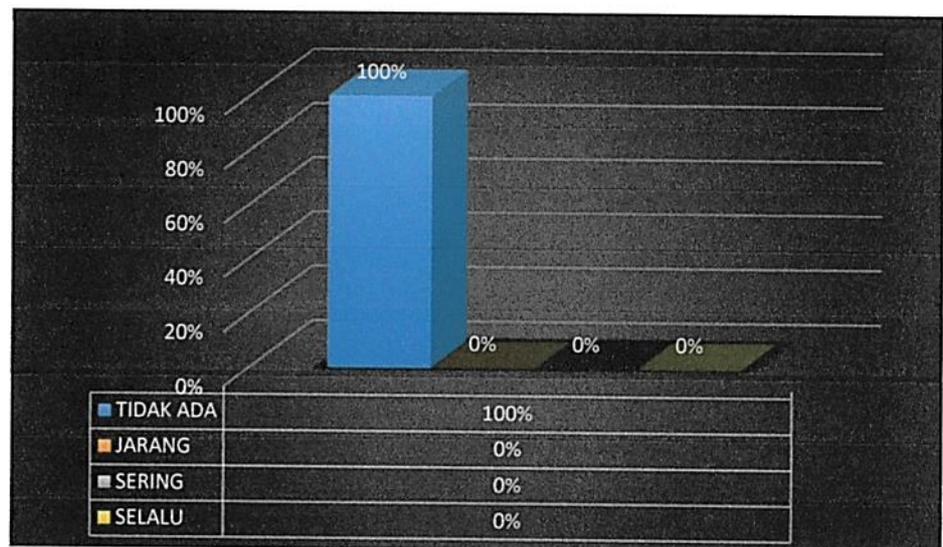
Tabel 8.

Indeks pada penyalahgunaan jabatan.

Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan Secara Cepat dan mudah selalu diberikan tanpa ada penawaran dari Petugas untuk meminta imbalan tertentu?

(Penyalahgunaan Jabatan)

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi		Jumlah Nilai Per Ruang Lingkup
			f	%	
1.	Tidak Ada	4	53	100	212
2.	Jarang	3	0	0	0
3.	Sering	2	0	0	0
4.	Selalu	1	0	0	0
Jumlah			53	100%	212
Nilai IPK (indeks Persepsi Korupsi)					4,00



3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 4,00 pada interval skor 3,26 s/d 4,00.

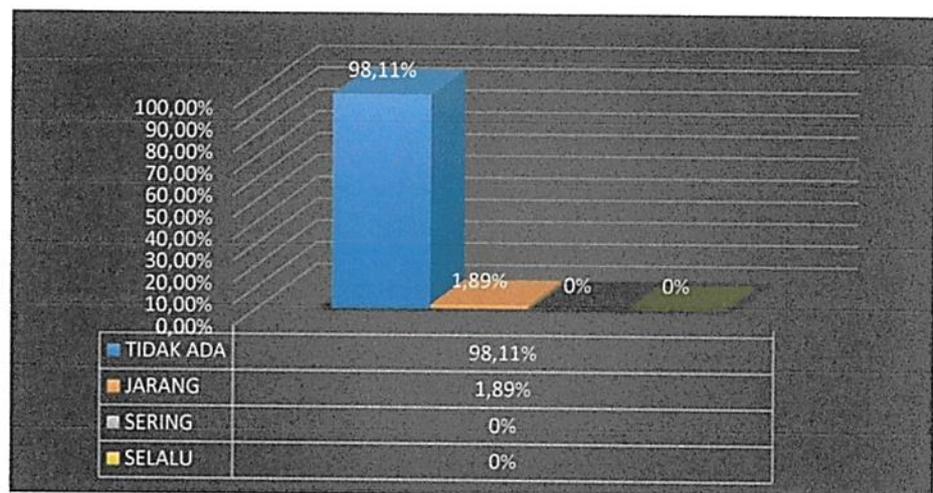
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Koba bersih dari Korupsi.

Tabel 9.

Indeks pada indikator menjual pengaruh

Pernahkah dihubungi oleh seseorang (Karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara? (Menjual pengaruh)

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi		Jumlah Nilai Per Ruang Lingkup
			F	%	
1.	Tidak Ada	4	52	98,11	208
2.	Jarang	3	1	1,89	3
3.	Sering	2	0	0	0
4.	Selalu	1	0	0	0
Jumlah			53	100%	211
Nilai IPK (indeks Persepsi Korupsi)					3,981



3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 4,00 pada interval skor 3,26 s/d 4,00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Koba bersih dari Korupsi.

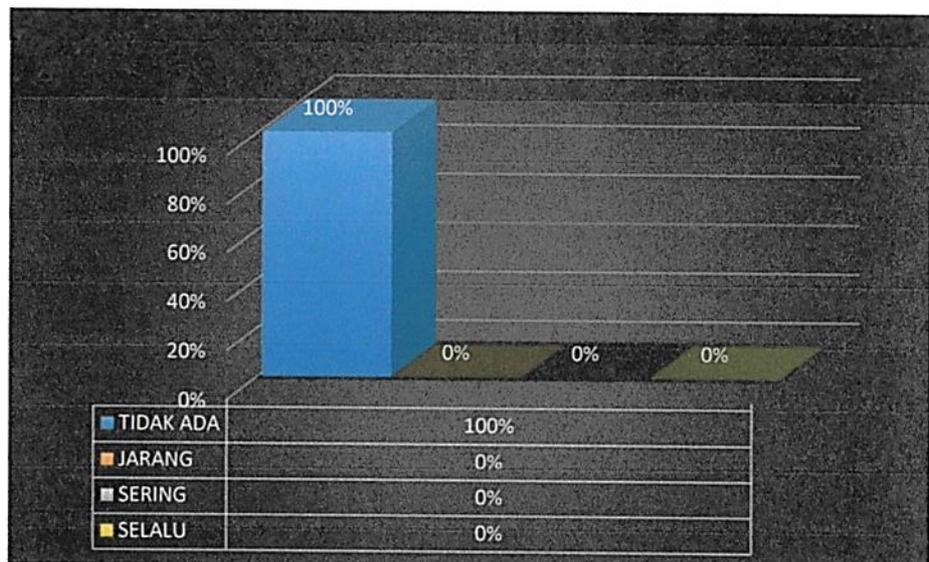
Tabel 10.

Indeks pada indikator Transaksi Biaya.

Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan?

(Transaksi Biaya)

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi		Jumlah Nilai Per Ruang Lingkup
			f	%	
1.	Tidak Ada	4	53	100	212
2.	Jarang	3	0	0	0
3.	Sering	2	0	0	0
4.	Selalu	1	0	0	0
Jumlah			52	100%	212
Nilai IPK (indeks Persepsi Korupsi)					4,00



3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 4,00 pada interval skor 3,26 s/d 4,00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Koba bersih dari Korupsi.

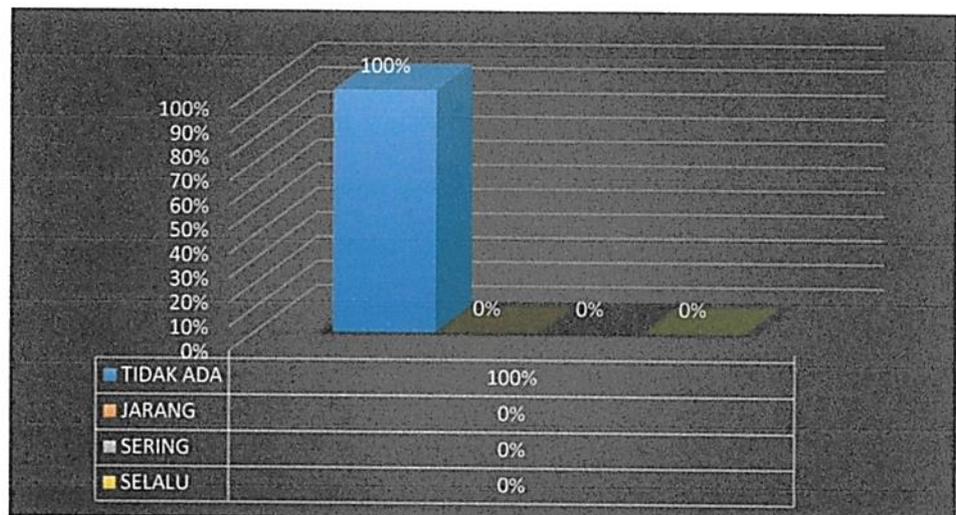
Tabel 11.

Tabel indeks pada indikator Biaya Tambahan

Apakah Selalu membayar sesuai dengan tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?

(Biaya Tambahan)

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi		Jumlah Nilai Per Ruang Lingkup
			F	%	
1.	Tidak Ada	4	53	100	212
2.	Jarang	3	0	0	0
3.	Sering	2	0	0	0
4.	Selalu	1	0	0	0
Jumlah			53	100%	212
Nilai IPK (indeks Persepsi Korupsi)					4,00



3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 4,00 pada interval skor 3,26 s/d 4,00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Koba bersih dari Korupsi.

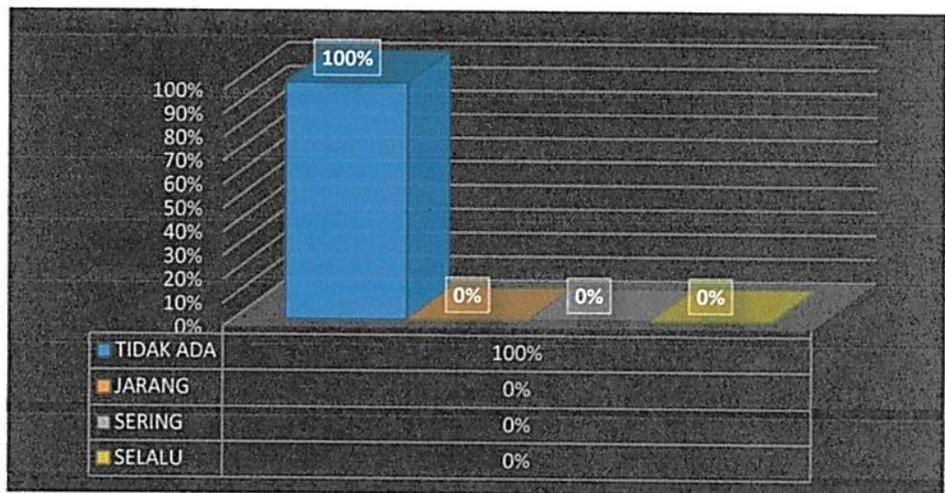
Tabel 12.

Indeks pada indikator Hadiah

Memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima meskipun tidak diminta?

(Hadiah)

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi		Jumlah Nilai Per Ruang Lingkup
			F	%	
1.	Tidak Ada	4	53	100	212
2.	Jarang	3	0	0	0
3.	Sering	2	0	0	0
4.	Selalu	1	0	0	0
Jumlah			53	100%	212
Nilai IPK (indeks Persepsi Korupsi)					4,00



3.2.7. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 4,00 pada interval skor 3,26 s/d 4.00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Koba bersih dari Korupsi.

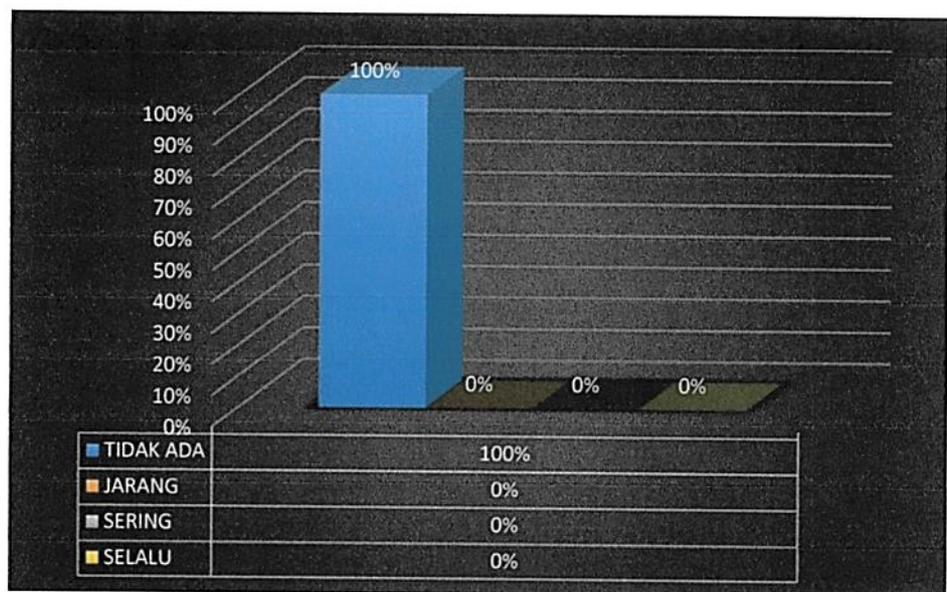
Tabel 13.

Indeks pada indikator Transparansi Biaya

Menerima Bukti Transaksi Keuangan/pembayaran yang sah Setelah proses Pembayaran dilakukan?

(Transparansi Biaya)

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi		Jumlah Nilai Per Ruang Lingkup
			F	%	
1.	Tidak Ada	4	53	100	212
2.	Jarang	3	0	0	0
3.	Sering	2	0	0	0
4.	Selalu	1	0	0	
Jumlah			53	100%	212
Nilai IPK (indeks Persepsi Korupsi)					4,00



3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 3,962 pada interval skor 3,26 s/d 4.00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Koba bersih dari Korupsi.

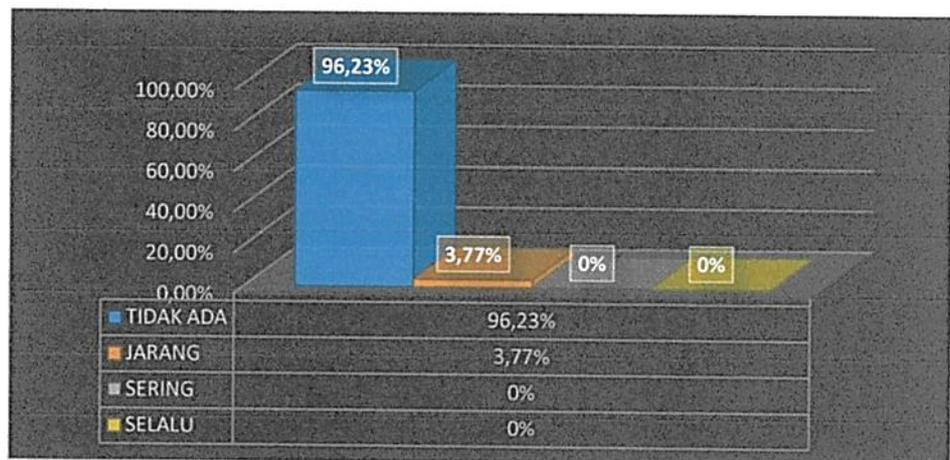
Tabel 14.

Indeks pada indikator Percaloan

Pernah Mengetahui ada praktek Percaloan dalam pengurusan Layanan di Pengadilan?

(Percaloan)

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi		Jumlah Nilai Per Ruang Lingkup
			F	%	
1.	Tidak Ada	4	51	96,23	204
2.	Jarang	3	2	3,77	6
3.	Sering	2	0	0	0
4.	Selalu	1	0	0	0
Jumlah			53	100%	210
Nilai IPK (indeks Persepsi Korupsi)					3,962



3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 4,00 pada interval skor 3,26 s/d 4,00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Korupsi.

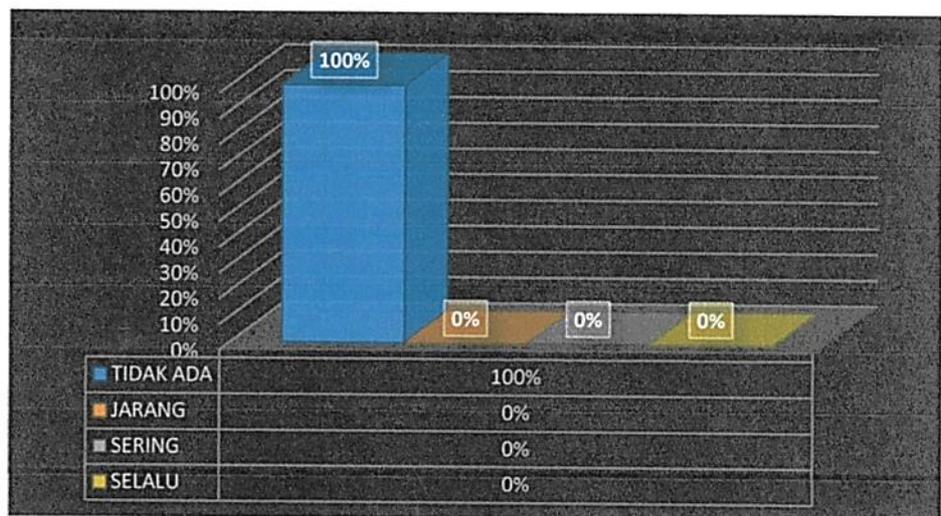
Tabel 15.

Indeks pada indikator Perbuatan Curang

Pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi Praktek KKN di Pengadilan?

(Perbuatan Curang)

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi		Jumlah Nilai Per Ruang Lingkup
			F	%	
1.	Tidak Ada	4	53	100	212
2.	Jarang	3	0	0	0
3.	Sering	2	0	0	0
4.	Selalu	1	0	0	0
Jumlah			53	100%	212
Nilai IPK (indeks Persepsi Korupsi)					4,00



3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 4,00 pada interval skor 3,26 s/d 4,00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Koba bersih dari Korupsi.

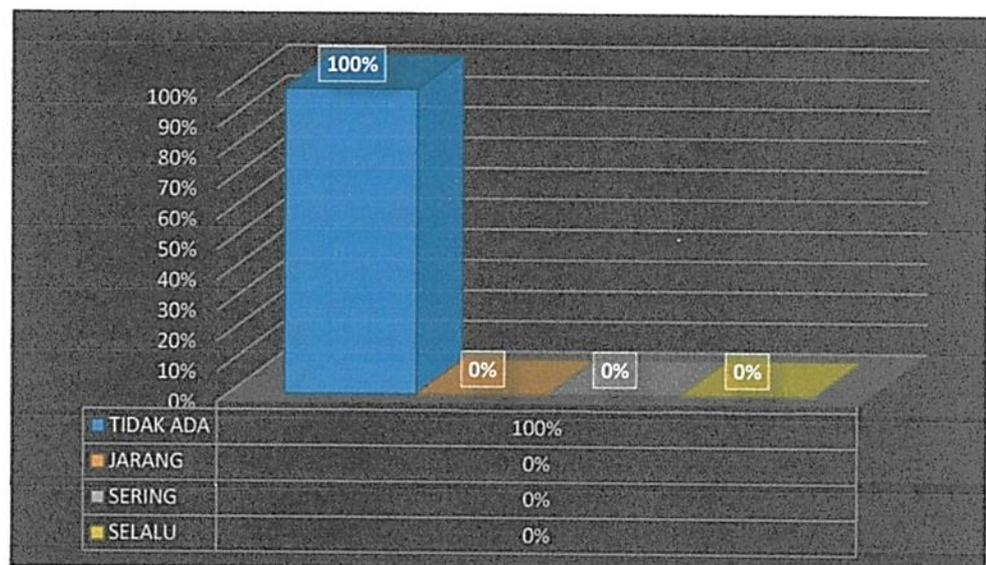
Tabel 16.

Indeks pada indikator Transaksi Rahasia

Pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff Pengadilan Diluar Persidangan?

(Transaksi Rahasia)

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi		Jumlah Nilai Per Ruang Lingkup
			F	%	
1.	Tidak Ada	4	53	100	212
2.	Jarang	3	0	0	0
3.	Sering	2	0	0	0
4.	Selalu	1	0	0	0
Jumlah			53	100%	212
Nilai IPK (indeks Persepsi Korupsi)					4,00



3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh **Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Koba** sebesar **3,99 (tiga koma sembilan sembilan)** pada interval skor 3,26 s/d 4,00.

Tabel 17.

No	Ruang lingkup	NRR	NRR TERTIMBANG
1	Manipulasi Peraturan	4,00	0,400
2	Penyalahgunaan Jabatan	4,00	0,400
3	Menjual Pengaruh	3,98	0,398
4	Transaksi Biaya	4,00	0,400
5	Biaya tambahan	4,00	0,400
6	Hadiah	4,00	0,400
7	Transparansi Biaya	4,00	0,400
8	Percaloan	3,96	0,396
9	Perbuatan Curang	3,90	0,390
10	Transaksi Rahasia	4,00	0,400

Indeks Persepsi Korupsi tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka **3,99 (tiga koma sembilan sembilan)**.

Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Koba

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survey yang dilakukan ini juga menjangking masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Koba. Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

- 1 Baik
Dalam melayani masyarakat sudah sangat ramah,
- 2 sopan dan santun
Saranan dan prasaranan yang dimiliki PN Koba
- 3 sudah lengkap
- 4 Pelayanan cepat dan baik
- 5 Petugas ramah dan memerikan penjelasan yang jelas
- 6 Petugas sudah memberikan informasi yang jelas
- 7 PN Koba sudah memberikan pelayanan yang cepat
- 8 Petugas yang memerikan layanan ramah
- 9 PN Koba maju terus
- 10 PN Koba sudah sangat baik dalam melayani
- 11 PTSP PN Koba sudah bagus
- 12 Pelayanan PTSP PN Koba sudah cepat
- 13 Pelayanan sudah dangat baik
- 14 Sudah memberikan pelayanan yang ramah
- 15 Baik
- 16 Baik
- 17 BAGUS
- 18 Baik
- 19 BAIK
- 20 Baik
- 21 Baik
- 22 Petugas Pelayanan ramah dan sopan
- 23 Petugas Pelayanan ramah
- 24 Bagus
- 25 Bagus
- 26 Baik
- 27 Petugas PTSP PN Koba sudah ramah dan sopan
- 28 sudah baik pelayanan PTSP PN Koba

- 29 Petugas sudah ramah dan baik dalam menjelaskan
- 30 Pelayanan sudah baik, petugas kompeten
- 31 Pengadilan Negeri Koba bagus, pelayanan oke
- 32 PTSP PN Koba sudah bagus
- 33 Sudah baik dan petugas ramah
- 34 Petugas sudah memberikan pelayanan yang baik
- 35 Bagus
- 36 Baik
- 37 Pelayanan sudah baik
- 38 Petugas PTSP ramah dan kompeten
- 39 Pelayanan sudah baik
- 40 BAIK
- 41 bagus
- 42 BAIK
- 43 BAIK
- 44 Selalalu baik
- 45 BAIK
- 46 Baik
- 47 Baik
- 48 Baik
- 49 Bagus
- 50 Baik
- 51 Baik
- 52 Pelayanan sudah sangat baik
PN Koba petugas PTSPnya sudah sangat baik dalam
- 53 meberikan pelayanan

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survey Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Koba diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Koba memiliki Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka **3,99 (tiga koma sembilan sembilan)**/dalam skala 1- 100 maka nilai yang diperoleh **99,86 %** (sembilan puluh sembilan koma delapan enam) persen atau masuk pada kategori Bersih dari Korupsi. Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

- 1) Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 4,00 **(8)**
- 2) Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4,00 **(2)**
- 3) Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,98 **(9)**
- 4) Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 4,00 **(3)**
- 5) Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 4,00 **(1)**
- 6) Indikator Hadiah, mendapat indeks 4,00 **(4)**
- 7) Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 4,00 **(5)**
- 8) Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,96 **(10)**
- 9) Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 4,00 **(6)**
- 10) Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4,00 **(7)**

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Koba, berdasarkan peringkat Indikatornya, diperoleh kepuasan responden **3 (tiga) nilai paling tinggi** berada pada Indikator **“Biaya Tambahan”** mendapat indeks 4,00 disusul Indikator **“Penyalahgunaan Jabatan”** mendapat indeks 4,00 dan Indikator **“Transaksi Biaya”** mendapat indeks 4,00;

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Koba, berdasarkan peringkat Indikatornya, diperoleh kepuasan responden **3 (tiga) nilai paling rendah** berada pada Indikator **“Percaloan”** mendapat indeks 3,96 disusul Indikator

“Menjual Pengaruh” mendapat indeks 3,98 dan Indikator **“Manipulasi Peraturan”** mendapat indeks 4,00;

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Koba triwulan ke I (satu) Tahun 2024 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,26 sampai dengan 4,00 atau masuk pada persepsi **Bersih Dari Korupsi** Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Koba, berdasarkan peringkat Indikatornya, diperoleh kepuasan responden 3 (tiga) nilai paling tinggi berada pada Indikator 3 (tiga) nilai paling tinggi berada pada Indikator “Biaya Tambahan” mendapat indeks 4,00 disusul Indikator “Penyalahgunaan Jabatan” mendapat indeks 4,00 dan Indikator “Transaksi Biaya” mendapat indeks 4,00;

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Koba, berdasarkan peringkat Indikatornya, diperoleh kepuasan responden 3 (tiga) nilai paling rendah berada pada Indikator “Percaloan” mendapat indeks 3,90 disusul Indikator “Menjual Pengaruh” mendapat indeks 3,96 dan Indikator “Manipulasi Peraturan” mendapat indeks 4,00.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI Koba

Jl. Soekarno Hatta II, Arung Dalam Koba, Kab. Bangka Tengah, Bangka Belitung KAB. BANGKA TENGAH
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
<https://pn-koba.go.id/>



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
Periode 1 Januari 2024 sampai 31 Maret 2024

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS

3,99 / 99,86%

Jumlah	53 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 35 PEREMPUAN : 18	
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0 Diploma 2 : 0 SD : 2 SMP : 5 SMU : 18 Diploma 1 : 1	
Pekerjaan	Diploma 3 : 2 S1 : 24 S2 : 1 S3 : 0 PNS : 2 TNI : 0 POLRI : 6 LAINNYA : 26	
	SWASTA : 11 WIRUSAHA : 7 TENAGA KONTRAK : 1	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?	3,962
2. Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?	3,981
3. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	4,000

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1. 1. Indikator Percaloan:

- Ketua, Panitera, Hakim Pengawas PTSP pada Pengadilan Negeri Koba melaksanakan briefing pada tanggal 1 April 2024 terhadap para Petugas PTSP menegaskan kepada Petugas PTSP agar melaksanakan Pelayanan sesuai SOP yang berlaku dan untuk tidak melakukan praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan Negeri Koba.
- Ketua Pengadilan Negeri Koba pada saat rapat bulanan tanggal 1 April 2024 kembali mensosialisasi isi PERMA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.
- Ketua, panitera, Hakim Pengawas PTPS dan Plh. Sekretaris Pengadilan Negeri Koba pada saat rapat PTSP bulan Maret menegaskan kepada Petugas PTSP agar melaksanakan Pelayanan sesuai SOP yang berlaku dan untuk tidak melakukan praktek percaloan/perantara tidak resmi dalam pengurusan layanan di Pengadilan Negeri Koba.

2. Menjual Pengaruh;

- Pada rapat bulanan bulan Maret 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 1 April 2024 Ketua Pengadilan Negeri Koba dan Panitera Pengadilan Negeri Koba, kembali mengintruksikan kepada seluruh Hakim, Pegawai maupun PPNPN Pengadilan Negeri Koba untuk selalu berpedoman pada SOP dan ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- Pada hari Selasa 2 April 2024 Hakim Pengawas PTSP bersama supervisor telah melakukan briefing terhadap Petugas PTSP sebagai garda terdepan pelayanan pengadilan mengintruksikan untuk melaksanakan pelayanan sebagaimana prosedur yang telah ditetapkan.

3. Manipulasi Peraturan;

- Pada hari Selasa 2 April 2024 Hakim Pengawas PTSP bersama supervisor, mensosialisasikan SK Standar Pelayanan Peradilan Pada Pengadilan Negeri Koba dam menegaskan kepada Petugas PTSP selalu memberitahukan kepada pengguna layanan Pengadilan Negeri Koba untuk tidak memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan.
- Ketua Pengadilan Negeri Koba pada saat rapat bulanan tanggal 1 April 2024 kembali mensosialisasi SK KMA No. 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaharuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri yang mana diberlakukan sebagai SOP Kepaniteraan Pada Pengadilan Negeri Koba.

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

2 April 2024
Ketua Pengadilan Negeri

DERT WERDINGSIH, S.H.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**JADWAL PELAKSANAAN SURVEI
DI PENGADILAN NEGERI KOBA KELAS II**

No	Tahap Survey	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1	Triwulan 1	Pelaksanaan Survey Triwulan I	2 Januari 2024 s/d 31 Maret 2024
		Pengolahan Data/Perhitungan Indeks	1 April 2024 s/d 3 April 2024
		Penyusunan dan Pelaporan	3 April 2024 s/d 5 April 2024
2	Triwulan 2	Pelaksanaan Survey Triwulan II	1 April 2024 s/d 30 Juni 2024
		Pengolahan Data/Perhitungan Indeks	1 Juli 2024 s/d 5 Juli 2024
		Penyusunan dan Pelaporan	4 Juli 2024 s/d 5 Juli 2024
3	Triwulan 3	Pelaksanaan Survey Triwulan III	1 Juli 2024 s/d 30 September 2024
		Pengolahan Data/Perhitungan Indeks	3 Oktober 2024 s/d 4 Oktober 2024
		Penyusunan dan Pelaporan	4 Oktober 2024 s/d 5 Oktober 2024
4	Triwulan 4	Pelaksanaan Survey Triwulan IV	1 Oktober 2024 s/d 30 Desember 2024
		Pengolahan Data/Perhitungan Indeks	2 Januari 2025 s/d 3 Januari 2025
		Penyusunan dan Pelaporan	3 Januari 2025 s/d 5 Januari 2025

DAFTAR PERTANYAAN SPAK

1. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?
 - Tidak Sesuai Prosedur
 - Jarang Sesuai Prosedur
 - Sering Sesuai Prosedur
 - Selalu Sesuai Prosedur
2. Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu?
 - Petugas melayani selalu meminta imbalan
 - Petugas melayani sering meminta imbalan
 - Petugas melayani jarang meminta imbalan
 - Petugas melayani tanpa meminta imbalan
3. Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara?
 - Selalu
 - Sering
 - Jarang
 - Tidak Ada
4. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan?
 - Tidak Pernah
 - Jarang
 - Sering
 - Selalu
5. Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?
 - Tidak Pernah
 - Jarang
 - Sering
 - Selalu
6. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta)?
 - Selalu

- Sering
 - Jarang
 - Tidak Ada
7. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan?
- Tidak Pernah
 - Jarang
 - Sering
 - Selalu
8. Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan?
- Selalu
 - Sering
 - Jarang
 - Tidak Ada
9. Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan?
- Selalu
 - Sering
 - Jarang
 - Tidak Ada
10. Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar persidangan?
- Selalu
 - Sering
 - Jarang
 - Tidak Ada

	Nama/Kode Responden	Domisili	Umur/JK	Pendidikan/Pekerjaan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Waktu Rekam
15	Rosalinda Pratiwi Tarigan R-401912-IPAK-9264935CA5 No. HP 82279448458	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	24 Tahun Perempuan	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	14 Maret 2024
16	Gallan Isaldi R-401912-IPAK-AD54CD1D43 No. HP 85368534758	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	30 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5 Maret 2024
17	Rudi R-401912-IPAK-6FF0D5D057 No. HP 81379005890	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	32 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5 Maret 2024
18	Rosalinda Pratiwi Tarigan R-401912-IPAK-02101D0178 No. HP 82279448458	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	24 Tahun Perempuan	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5 Maret 2024
19	Raka R-401912-IPAK-4838E02F91 No. HP 8978080179	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	30 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 Maret 2024
20	Agi R-401912-IPAK-D3AE0A8442 No. HP 082178245021	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	29 Tahun Laki-laki	S1POLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	29 Februari 2024
21	AGIT BAYU SUMANTRI R-401912-IPAK-76FFBD9DB3 No. HP 082123586863	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	28 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	29 Februari 2024
22	ASMADI AYUTTULAH R-401912-IPAK-A20629CEA8 No. HP 81367025835	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	37 Tahun Laki-laki	SMPWIRUSAHA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	27 Februari 2024
23	SUNARYANI R-401912-IPAK-491B055FC7 No. HP 81396830936	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	36 Tahun Perempuan	SMPWIRUSAHA	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	27 Februari 2024
24	Naryuni R-401912-IPAK-F51B9B891C No. HP 81271154558	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	41 Tahun Perempuan	SDLAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	27 Februari 2024
25	Sumiati R-401912-IPAK-300C89DD29 No. HP 82184680741	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	34 Tahun Perempuan	SMPLAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	27 Februari 2024
26	Cici Suprika R-401912-IPAK-35965598AD No. HP 82186020397	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	24 Tahun Perempuan	SMUSWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	27 Februari 2024
27	Wira Andika, R-401912-IPAK-DA498CA89A No. HP 8982357898	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	30 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	26 Februari 2024
28	Fachriansyah R-401912-IPAK-D0F12A504A No. HP 82167672006	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	23 Tahun Laki-laki	SMUPOLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	26 Februari 2024

	Nama/Kode Responden	Domisili	Umur/JK	Pendidikan/Pekerjaan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Waktu Rekam
29	Fahrozi R-401912-IPAK-B8F6981C2F No. HP 83826181589	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	43 Tahun Laki-laki	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	26 Februari 2024
30	Shandy Hazuri Ihsan R-401912-IPAK-A62B1E3706 No. HP 82182110172	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	23 Tahun Laki-laki	SMUPOLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	26 Februari 2024
31	AJI R-401912-IPAK-060CD64DFF No. HP 82181880246	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	34 Tahun Laki-laki	Diploma 1SWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	26 Februari 2024
32	SUSANTI R-401912-IPAK-846C389437 No. HP 82184680741	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	30 Tahun Perempuan	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	26 Februari 2024
33	SUMIATI R-401912-IPAK-8D41AA569D No. HP 82184680741	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	32 Tahun Perempuan	SMULAINNYA	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	26 Februari 2024
34	AGUS R-401912-IPAK-3E14D23A01 No. HP 85267208236	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	35 Tahun Laki-laki	SMUWIRUSAHA	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	26 Februari 2024
35	Kartono R-401912-IPAK-37136824BC No. HP 85758440971	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	43 Tahun Laki-laki	SMUSWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	21 Februari 2024
36	Leni R-401912-IPAK-F58C408E66 No. HP 87891694525	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	40 Tahun Perempuan	SMUSWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	21 Februari 2024
37	KARTONO R-401912-IPAK-10029DADE7 No. HP 83175114282	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	40 Tahun Laki-laki	SMUSWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	19 Februari 2024
38	ARI AP R-401912-IPAK-24FE6745C2 No. HP 82372280647	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	28 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	19 Februari 2024
39	SUSANTI R-401912-IPAK-7998AFB267 No. HP 82178088475	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	30 Tahun Perempuan	SMUWIRUSAHA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	13 Februari 2024
40	Nurhalimah R-401912-IPAK-2164B57C60 No. HP 82280242442	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	52 Tahun Perempuan	SDLAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7 Februari 2024
41	Sumiati R-401912-IPAK-28C2A5E9A9 No. HP 82184680741	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	34 Tahun Perempuan	SMPLAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7 Februari 2024
42	Selvia Vilani R-401912-IPAK-D081B6BCB4 No. HP 882870075822	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	26 Tahun Perempuan	S1SWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7 Februari 2024
43	ROBY KHIRMANSYAH R-401912-IPAK-2AFA0059CC No. HP 85270650535	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	30 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	30 Januari 2024

**LAPORAN MONITORING EVALUASI
DAN TINDAK LANJUT
SURVEY PERSEPSI KORUPSI
DI PENGADILAN NEGERI KOBA**



**TRIWULAN I
TAHUN 2024**

**MONITORING EVALUASI DAN TINDAK LANJUT
SURVEY PERSEPSI KORUPSI
DI PENGADILAN NEGERI Koba**

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Monitoring

Berdasarkan Publikasi Indeks Persepsi Anti Korupsi periode 1 Januari 2024 sampai 31 Maret 2024 terdapat 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur:

1. Percaloan (tentang ada atau tidak praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan dengan nilai rata rata per ruang lingkup yaitu 3,98;
2. Menjual Pengaruh (tentang pernah atau tidak dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara), dengan nilai rata rata per ruang lingkup yaitu 3,96;
3. Manipulasi Peraturan (tentang Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku), dengan nilai rata rata per ruang lingkup yaitu 4,00;

2. Tujuan Monitoring

Sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dalam mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Bebas Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Koba dan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Koba;

3. Pelaksanaan Monitoring

Monitoring diawali dengan penelitian hasil indeks kepuasan masyarakat Triwulan I periode 1 Januari 2024 sampai 31 Maret 2024 untuk fokus terhadap evaluasi yang akan dilaksanakan.

II. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Pengadilan Negeri Koba dalam hal ini melakukan Survey Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan sebanyak 4 (empat) kali setiap tahunnya dengan output berupa nilai Survei Persepsi Korupsi (SPK). Nilai SPK tersebut menjadi salah satu indikator kualitas pelayanan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Koba. Dari hasil pelaksanaan survey yang diambil dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Pengadilan Negeri Koba dengan alamat: http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/kontrol_ipk, yang dilaksanakan pada Bulan Januari s/d Maret tahun 2024 diperoleh nilai Indeks Persepsi Korupsi **3.99 (tiga koma sembilan sembilan)** atau **99,86 % (sembilan puluh sembilan koma delapan enam)** persen atau masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi**. Perolehan Nilai IPK di Pengadilan Negeri Koba untuk triwulan III (tiga) Tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 4,00 **(8)**
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4,00 **(2)**
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,98 **(9)**
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 4,00 **(3)**
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 4,00 **(1)**
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 4,00 **(4)**
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 4,00 **(5)**
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,96 **(10)**
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 4,00 **(6)**
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4,00 **(7)**

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Koba, berdasarkan peringkat Indikatornya, diperoleh

kepuasan responden 3 (tiga) nilai paling tinggi berada pada Indikator “Biaya Tambahan” mendapat indeks 4,00 disusul Indikator “Penyalahgunaan Jabatan” mendapat indeks 4,00 dan Indikator “Transaksi Biaya” mendapat indeks 4,00;

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Koba, berdasarkan peringkat Indikatornya, diperoleh kepuasan responden 3 (tiga) nilai paling rendah berada pada Indikator “Percaloan” mendapat indeks 3,90 disusul Indikator “Menjual Pengaruh” mendapat indeks 3,96 dan Indikator “Manipulasi Peraturan” mendapat indeks 4,00.

Pada rapat dan Monev IPK triwulan I tahun 2024 Pengadilan Negeri Koba, telah dilakukan analisis yang mana terhadap hasil survei unsur dengan 3 (tiga) nilai terendah yaitu:

1. Indikator Percaloan

Dari hasil yang diperoleh Pengadilan Negeri Koba pada indikator Percaloan bahwa Pengadilan Negeri Koba memperoleh Nilai yaitu sebesar 3,96 dengan demikian Masyarakat menyatakan bahwa walaupun minim tapi masih ada praktek Percaloan didalam pelayanan yang diberikan oleh Pejabat Pengadilan Negeri Koba, walaupun demikian Pengadilan Negeri Koba tetap harus meningkatkan pelayanan yang maksimal;

2. Indikator Menjual Pengaruh

Dari hasil yang diperoleh Pengadilan Negeri Koba pada indikator transparansi Biaya bahwa Pengadilan Negeri Koba memperoleh Nilai Maksimal yaitu sebesar 3,96 dengan demikian Masyarakat menyatakan bahwa walaupun minim tapi masih ada kemungkinan dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang menjanjikan akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara di Pengadilan Negeri Koba, walaupun demikian Pengadilan Negeri Koba tetap harus meningkatkan pelayanan yang maksimal.

3. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari hasil yang diperoleh Pengadilan Negeri Koba pada indikator **Manipulasi Peraturan** bahwa Pengadilan Negeri Koba memperoleh Nilai yaitu sebesar

4,00 dimana sudah merupakan nilai maksimal akan tetapi dalam aplikasi Survey Pelayanan Elektronik termasuk dalam 3 unsur terendah, dengan demikian Pengadilan Negeri Koba tetap terus meningkatkan pelayanan yang maksimal;

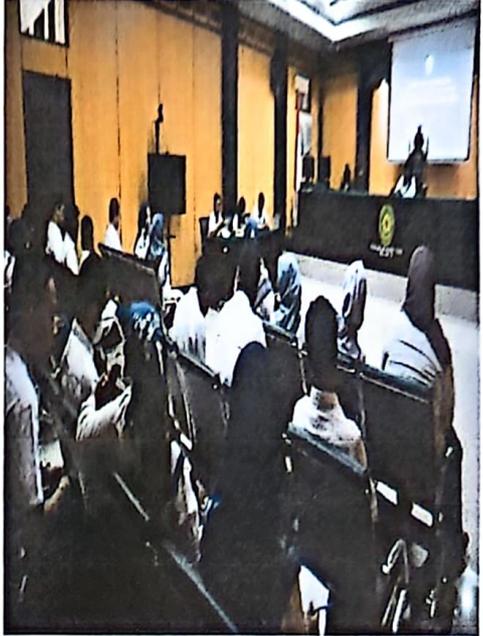
III. TINDAK LANJUT TERHADAP 3 UNSUR TERENDAH

Dalam hal menindaklanjuti hasil Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Koba, Ketua Pengadilan Negeri Koba telah mengintruksikan pihak terkait agar melakukan tindak lanjut dalam rangka meningkatkan nilai IPAK pada 3 (tiga) nilai terendah yaitu pada unsur Indikator Percaloan, Indikator Menjual Pengaruh, dan Indikator Manipulasi Peraturan, sebagai berikut:

No	TINDAK LANJUT	EVIDENCE
1.	<p>Indikator Percaloan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketua, Panitera, Hakim Pengawas PTSP pada Pengadilan Negeri Koba melaksanakan briefing pada tanggal 1 April 2024 terhadap para Petugas PTSP menegaskan kepada Petugas PTSP agar melaksanakan Pelayanan sesuai SOP yang berlaku dan untuk tidak melakukan praktek percaloan/perantara tidak resmi dalam pengurusan layanan di Pengadilan Negeri Koba. - Ketua Pengadilan Negeri Koba 	

	<p>pada saat rapat bulanan tanggal 1 April 2024 kembali mensosialisasi isi PERMA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;</p>	
	<p>- Ketua, panitera, Hakim Pengawas PTPS dan Plh. Sekretaris Pengadilan Negeri Koba pada saat rapat PTSP bulan Maret menegaskan kepada Petugas PTSP agar melaksanakan Pelayanan sesuai SOP yang berlaku dan untuk tidak melakukan praktek percaloan/perantara tidak resmi dalam pengurusan layanan di Pengadilan Negeri Koba..</p>	
<p>2.</p>	<p>Menjual Pengaruh;</p> <p>- Pada rapat bulanan bulan Maret 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 1 April 2024 Ketua Pengadilan Negeri Koba dan Panitera Pengadilan Negeri Koba, kembali mengintruksikan kepada seluruh Hakim, Pegawai maupun PPNPN Pengadilan Negeri Koba untuk selalu berpedoman pada SOP</p>	

	<p>dan ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing.</p>	
	<p>- Pada hari Selasa 2 April 2024 Hakim Pengawas PTSP bersama supervisor telah melakukan briefing terhadap Petugas PTSP sebagai garda terdepan pelayanan pengadilan mengintruksikan untuk melaksanakan pelayanan sebagaimana prosedur yang telah ditetapkan.</p>	
<p>3.</p>	<p>Manipulasi Peraturan;</p> <p>- Pada hari Selasa 2 April 2024 Hakim Pengawas PTSP bersama supervisor, mensosialisasikan SK Standar Pelayanan Peradilan Pada Pengadilan Negeri Koba dan menegaskan kepada Petugas PTSP selalu memberitahukan kepada pengguna layanan Pengadilan Negeri Koba untuk tidak memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan.</p>	 

<p>- Ketua Pengadilan Negeri Koba pada saat rapat bulanan tanggal 1 April 2024 kembali mensosialisasi SK KMA No. 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaharuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri yang mana diberlakukan sebagai SOP Kepaniteraan Pada Pengadilan Negeri Koba.</p>	
---	---

Diharapkan dengan tindakan perbaikan yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Koba dapat terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada Pengguna atau Penerima layanan pada Pengadilan Negeri Koba sehingga merasa sangat puas dengan pelayanan yang telah diberikan oleh Pengadilan Negeri Koba.

Koba, 2 April 2024
Pengadilan Negeri Koba,
Ketua

Derit Werdiningsih, S.H.





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG
PENGADILAN NEGERI KOBA**

Jln. Gelora No. 1 Komplek Perkantoran Pemkab. Bangka Tengah, Kecamatan Koba,
Kelurahan Padang Mulya, Bangka Tengah, Kep. Bangka Belitung 33681
www.pn-koba.go.id, pengadilan.negeri.koba@gmail.com

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal Pelaksanaan	:	Senin, 1 April 2024;
Jam Pelaksanaan	:	10.00 WIB;
Tempat Pelaksanaan	:	Ruang Sidang Garuda Pengadilan Negeri Koba
Acara	:	Rapat Monitoring dan Evaluasi Laporan Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Triwulan I Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Koba;

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	DERIT WERDININGSIH, S.H.	KETUA	
2	SHINTA NIKE AYUDIA, S.H., M.Kn.	HAKIM	
3	TREMA FEMULA GRAFIT, S.H., M.H.	HAKIM	
4	RIZKI RIDHA DAMAYANTI, S.H., M.H.	HAKIM	
5	NOVIA NANDA PERTIWI, S.H.	HAKIM	
6	DEVIA HERDITA, S.H.	HAKIM	
7	MUCHSIN, S.H., M.H.	PANITERA	
8	JAMALUDIN, S.H.	SEKRETARIS	



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG
PENGADILAN NEGERI KOBA**

Jln. Gelora No. 1 Komplek Perkantoran Pemkab. Bangka Tengah, Kecamatan Koba,
Kelurahan Padang Mulya, Bangka Tengah, Kep. Bangka Belitung 33681
www.pn-koba.go.id, pengadilan.negeri.koba@gmail.com

9	USPA DEMARATI, S.H.	PANITERA MUDA HUKUM	
10	ERWIN MARANTIKA, S.H.	PANITERA MUDA PIDANA	
11	OSKAR SYAIFULLAH, S.Kom.	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	
12	YEYEN WAHYUNI, S.Kom.	KASUBBAG PTIP	
13	RENDRA, S.H.	PANITERA PENGGANTI	
14	KIKI KURNIAWAN, S.H.	Plt. PANITERA MUDA PERDATA	
15	EKO ARFANDI, S.H.	BENDAHARA	
16	MARIHOT PANGITUHAN	JURUSITA	
17	ABAD RIBUNANURIN, A.Md.	Plt. KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG
PENGADILAN NEGERI KOBA**

Jln. Gelora No. 1 Komplek Perkantoran Pemkab. Bangka Tengah, Kecamatan Koba,
Kelurahan Padang Mulya, Bangka Tengah, Kep. Bangka Belitung 33681
www.pn-koba.go.id, pengadilan.negeri.koba@gmail.com

**PELAKSANAAN MONITORING EVALUASI DAN TINDAK LANJUT 3
UNSUR TERENDAH DALAM PELAKSANAAN SURVEY INDEKS
KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN I PERIODE JANUARI - MARET
2024**





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG
PENGADILAN NEGERI KOBA**

Jln. Gelora No. 1 Komplek Perkantoran Pemkab. Bangka Tengah, Kecamatan Koba,
Kelurahan Padang Mulya, Bangka Tengah, Kep. Bangka Belitung 33681
www.pn-koba.go.id, pengadilan.negeri.koba@gmail.com

**PELAKSANAAN MONITORING EVALUASI DAN TINDAK LANJUT 3
UNSUR TERENDAH DALAM PELAKSANAAN SURVEY INDEKS
KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN I PERIODE JANUARI - MARET
2024**

